



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
(DP2PA)

Jln. Dahlia No. 01. Komplek Balaikota. Kelurahan Bugis. Kota Samarinda Tel/Fax (0541) 743307,
Telpon Pengaduan +62 833-2442-1313 Kode Pos : 75121 Email : dppkotasamarinda@yahoo.com

LEMBAR KERJA GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) Tahun 2024		
Baris 1	Nama OPD	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Program	Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
	Kegiatan	<ul style="list-style-type: none">- Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG- Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/KotaSosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG
	Sub Kegiatan	<ul style="list-style-type: none">- Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota- Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota- Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota- Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan (UPTD PPA)- Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota (UPTD PPA)
	Tujuan	Memastikan bahwa kebijakan, program, dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dapat mengakomodasi kepentingan serta kebutuhan perempuan dan laki-laki secara setara

Baris 2	Data Pembuka Wawasan (Data Responsif Gender)	Jumlah PD & Kecamatan yang menyelesaikan penyusunan GAP/GBS Tahun 2023 : Perangkat Daerah : 9 Kecamatan : 2 (Sungai Kunjang, Sungai Pinang)	
Baris 3	Faktor Kesenjangan	Faktor kesenjangan/ permasalahan (452)	Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, penguatan kebijakan, serta komitmen dari semua pihak
	Sebab Kesenjangan Internal (di OPD)		<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya Pemahaman dan Kesadaran Gender - Minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang Terlatih - Keterbatasan Waktu dan Prioritas
	Sebab Kesenjangan Eksternal		<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya Pemahaman dan Kesadaran Gender - Minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang Terlatih - Tantangan dalam Pengumpulan Data dan Monitoring
Baris 4	Tujuan Responsif Gender	Memastikan bahwa kebijakan, program, dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dapat mengakomodasi kepentingan serta kebutuhan perempuan dan laki-laki secara setara	
Baris 5	Rencana Aksi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bimtek PPRG bagi focal point seluruh Perangkat Daerah dan Kecamatan. Kerjasama dengan BPSDM Provinsi Kaltim dan Driver POKJA PUG Kota Samarinda. 2. Advokasi PPRG dalam penyusunan Dokumen Analisis Gender (GAP/GBS) 3. Mendorong terlaksananya Review Penyelenggaraan PUG Tahun 2023 oleh Inspektorat 4. Inisiasi Regulasi terkait Revitalisasi PUG (Instruksi Wali Kota) 5. Inisiasi kelembagaan Pusat Pembelajaran Perempuan (PUTARAN). 6. Menyelenggarakan Seminar Gender bidang Pendidikan menghadirkan pembicara Nasional. 7. Seminar Sinergi Pentahelix Tahun 2024 	

			<p>8. Menyelenggarakan Penilaian Gender Champion Samarinda (GCS Award 2024)</p> <p>9. Pelaksanaan Evaluasi Mandiri PUG.</p> <p>10. Implementasi Analisis Gender 4 langkah (Penyusunan Analisis Gender dalam Pengelolaan Sampah Laut)</p>
Baris 6	Data Dasar/Baseline		<p>Jumlah PD & Kecamatan yang menyelesaikan penyusunan GAP/GBS Tahun 2023 :</p> <p>Perangkat Daerah : 9</p> <p>Kecamatan : 2</p> <p>(Sungai Kunjang, Sungai Pinang)</p>
Baris 7	Pengu kuran Hasil	Output	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG - Jumlah Dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG - Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti sosialisasi pelaksanaan PUG termasuk PPRG.
		Outcome	Jumlah Dokumen Pelembagaan PUG
		Dampak	Proses Pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan

Samarinda, 11 Januari 2024

Kepala Dinas



DR. Ibnu Araby, M.M.Pd

Pembina Utama Muda IV/ c
NIP 19670713 199103 1 013



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
(DP2PA)

Jln. Dahlia No. 01. Komplek Balaikota. Kelurahan Bugis. Kota Samarinda Tel/Fax (0541) 743307,
Telpon Pengaduan +62 833-2442-1313 Kode Pos : 75121 Email : dpppakotasamarinda@yahoo.com

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER
(GENDER BUDGET STATEMENT)

SKPD : **Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

TAHUN ANGGARAN : **2024**

PROGRAM	Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan		
KEGIATAN	<ul style="list-style-type: none">- Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG- Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/KotaSosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG		
KODE Kegiatan	2.08.02.2.01		
ANALISIS SITUASI	Jumlah PD & Kecamatan yang menyelesaikan penyusunan GAP/GBS Tahun 2023 : Perangkat Daerah : 9 Kecamatan : 2 (Sungai Kunjang, Sungai Pinang)		
RENCANA TINDAK	Kegiatan	<ul style="list-style-type: none">- Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG- Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/KotaSosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	
	Tujuan	Memastikan bahwa kebijakan, program, dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dapat mengakomodasi kepentingan serta kebutuhan perempuan dan laki-laki secara setara	
	Aktivitas	1. Bimtek PPRG bagi focal point seluruh Perangkat Daerah dan Kecamatan. Kerjasama dengan	

			<p>BPSDM Provinsi Kaltim dan Driver POKJA PUG Kota Samarinda.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Advokasi PPRG dalam penyusunan Dokumen Analisis Gender (GAP/GBS) 3. Mendorong terlaksananya Review Penyelenggaraan PUG Tahun 2023 oleh Inspektorat 4. Inisiasi Regulasi terkait Revitalisasi PUG (Instruksi Wali Kota) 5. Inisiasi kelembagaan Pusat Pembelajaran Perempuan (PUTARAN). 6. Menyelenggarakan Seminar Gender bidang Pendidikan menghadirkan pembicara Nasional. 7. Seminar Sinergi Pentahelix Tahun 2024 8. Menyelenggarakan Penilaian Gender Champion Samarinda (GCS Award 2024) 9. Pelaksanaan Evaluasi Mandiri PUG. 10. Implementasi Analisis Gender 4 langkah (Penyusunan Analisis Gender dalam Pengelolaan Sampah Laut)
		<p>Sumber daya (Inputs)</p>	<p>SDM (Fasilitator Daerah, Focal Point PD, Organisasi Mitra (Pengurus SIGAP, Pengurus KOPRI PC PMII, Pengurus BEM Universitas se Kota Samarinda, Lembaga Pemerhati Gender, Media)</p> <p>Anggaran : APBD Kota Samarinda</p>

		Perangkat Keras (Komputer, Laptop, Printer, Mobil Perlindungan).
	<i>output</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG - Jumlah Dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG - Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti sosialisasi pelaksanaan PUG termasuk PPRG.
ALOKASI SUMBER DAYA	<i>Anggaran</i>	Rp. 1.044.095.260
	<i>SDM</i>	SDM (Fasilitator Daerah, Focal Point PD, Organisasi Mitra (Pengurus SIGAP, Pengurus KOPRI PC PMII, Pengurus BEM Universitas se Kota Samarinda, Lembaga Pemerhati Gender, Media)
	<i>Peralatan dan Mesin</i>	Perangkat Keras (Komputer, Laptop, Printer, Media Sosial, Website : https://gesit.org).
Outcomes	Jumlah Dokumen Pelembagaan PUG	
Dampak	Proses Pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan.	

Samarinda, 11 Januari 2024

Kepala Dinas



DR. Ibnu Araby, M.M.Pd

Pembina Utama Muda IV/ c

NIP 19670713 199103 1 013



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
(DP2PA)

Jln. Dahlia No. 01. Komplek Balaikota. Kelurahan Bugis. Kota Samarinda Tel/Fax (0541) 743307,
Telpon Pengaduan +62 833-2442-1313 Kode Pos : 75121 Email : dpppakotasamarinda@yahoo.com

LEMBAR KERJA GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) Tahun 2024		
Baris 1	Nama OPD	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Program	Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
	Kegiatan	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten Kota
	Sub Kegiatan	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan Bidang Politik Hukum, Sosial, dan Ekonomi
	Tujuan	Memberikan Advokasi pendampingan kepada organisasi perempuan dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang Politik, hukum, Sosial dan Ekonomi
Baris 2	Data Pembuka Wawasan (Data Responsif Gender)	Jumlah data Organisasi perempuan yang diberikan Advokasi Politik, Hukum, Sosial, Ekonomi 32 yang terdata sudah diberikan Advokasi sebanyak 24 organisasi
Baris 3	Faktor Kesenjangan	Faktor kesenjangan/ permasalahan (452)
	Sebab Kesenjangan Internal (di OPD)	- Keterbatasan Anggaran - SDM Terbatas (Quantity)
	Sebab Kesenjangan	- Dominasi Laki-laki dalam Kepemimpinan dan Pengambilan Keputusan

		gan Eksternal	<ul style="list-style-type: none"> - Stigma dan Stereotip Gender Di dalam organisasi politik - Kurangnya Kebijakan yang Mendorong Partisipasi Perempuan
Baris 4	Tujuan Responsif Gender		Memastikan bahwa kebijakan, program, dan intervensi yang diterapkan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi dapat secara aktif mengidentifikasi, mengatasi, dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
Baris 5	Rencana Aksi		<ol style="list-style-type: none"> 1. Seminar Peningkatan Peran Perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi 2. Sosialisasi produk hukum bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 3. FGD Peningkatan Peran Forum Puspa Bungah Gerecek bidang Politik, Hukum, Sosial, Budaya 4. Penguatan dan Pengembangan LPLPP (Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan) 5. Seminar Hari Kartini 6. Bimtek UMKM PEKKA untuk strategi branding dan digital marketing 7. Kegiatan Pusat Pembelajaran Perempuan (PUTARAN) 8. Peringatan Hari Ibu ke 96 Tahun 2024 9. Pembinaan Desa Prima dalam peningkatan manajemen usaha di 3 kecamatan 10. Pengembangan <i>softskill</i> bagi UMKM Perempuan
Baris 6	Data Dasar/Baseline		<p>Jumlah data Organisasi perempuan yang diberikan Advokasi</p> <p>Politik, Hukum, Sosial, Ekonomi 32 yang terdata sudah diberikan Advokasi sebanyak 24 organisasi</p>
Baris 7		Output	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah organisasi masyarakat yang mendapat advokasi dan pendampingan kebijakan peningkatan partisipasi perempuan di bidang

Pengu kuran Hasil		<p>politik, hukum, sosial, dan ekonomi kewenangan kab/kota</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah sumber daya LPLPP kewenangan kab/koa yang mendapat peningkatan kapasitas - Jumlah LPLPP kewenangan kab/kota yang mendapat advokasi dan pendampingan.
	Outcome	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Organisasi perempuan yang sudah mendapatkan Advokasi dan Pendampigan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi kewenangan kab/kota - Jumlah LPLPP kewenangan kab/kota yang mendapat advokasi dan pendampingan - Jumlah sumber daya LPLPP yang mendapat peningkatan kapasitas
	Dampak	<p>Terintegrasinya prinsip kesetaraan gender dalam berbagai kebijakan, program, dan kegiatan yang ada di masyarakat, serta untuk memberdayakan perempuan agar mereka dapat berpartisipasi secara aktif dan setara dalam kehidupan publik dan privat.</p>

Samarinda, 11 Januari 2024

Kepala Dinas



DR. Ibnu Araby, M.M.Pd
 Pembina Utama Muda IV/ c
 NIP 19670713 199103 1 013



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
(DP2PA)

Jln. Dahlia No. 01. Komplek Balaikota. Kelurahan Bugis. Kota Samarinda Tel/Fax (0541) 743307,
Telpon Pengaduan +62 833-2442-1313 Kode Pos : 75121 Email : dppkotasamarinda@yahoo.com

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER
(GENDER BUDGET STATEMENT)

SKPD : **Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

TAHUN ANGGARAN : **2024**

PROGRAM	Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan		
KEGIATAN	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten Kota		
KODE Kegiatan	2.08.02.2.02		
ANALISIS SITUASI	Jumlah data Organisasi perempuan yang diberikan Advokasi Politik, Hukum, Sosial, Ekonomi 32 yang terdata sudah diberikan Advokasi sebanyak 24 organisasi		
RENCANA TINDAK	Kegiatan	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten Kota	
	Tujuan	Memberikan Advokasi pendampingan kepada organisasi perempuan dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang Politik, hukum, Sosial dan Ekonomi	
	Aktivitas	<ol style="list-style-type: none">1. Seminar Peningkatan Peran Perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi2. Sosialisasi produk hukum bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak3. FGD Peningkatan Peran Forum Puspa Bungah Gerecek bidang Politik, Hukum, Sosial, Budaya	

			<ol style="list-style-type: none"> 4. Penguatan dan Pengembangan LPLPP (Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan) 5. Seminar Hari Kartini 6. Bimtek UMKM PEKKA untuk strategi branding dan digital marketing 7. Kegiatan Pusat Pembelajaran Perempuan (PUTARAN) 8. Peringatan Hari Ibu ke 96 Tahun 2024 9. Pembinaan Desa Prima dalam peningkatan manajemen usaha di 3 kecamatan 10. Pengembangan <i>softskill</i> bagi UMKM Perempuan
		Sumber daya (Inputs)	<p>SDM PD, Forum Puspa Bungah Gerecek, Mom Preneurs, PEKKA, Tenaga Ahli</p> <p>Anggaran : APBD Kota Samarinda</p> <p>Perangkat Keras (Komputer, Laptop, Printer, ATK, Scanner, Proyektor, Pointer, Flashdisk, Hardisk Eksternal)</p>
		output	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah organisasi masyarakat yang mendapat advokasi dan pendampingan kebijakan peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi kewenangan kab/kota - Jumlah sumber daya LPLPP kewenangan kab/koa yang mendapat peningkatan kapasitas

			- Jumlah LPLPP kewenangan kab/kota yang mendapat advokasi dan pendampingan
ALOKASI SUMBER DAYA	Anggaran	Rp. 350.000.000	
	SDM	SDM PD, Forum Puspa Bunga Gerecek, Mom Preneurs, PEKKA, Tenaga Ahli	
	Peralatan dan Mesin	Perangkat Keras (Komputer, Laptop, Printer, ATK, Scanner, Proyektor, Pointer, Flashdisk, Hardisk Eksternal)	
Outcomes	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah keterwakilan perempuan di parlemen, perempuan sebagai tenaga manajerial, dan sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja - Jumlah layanan LPLPP 		
Dampak	Terintegrasinya prinsip kesetaraan gender dalam berbagai kebijakan, program, dan kegiatan yang ada di masyarakat, serta untuk memberdayakan perempuan agar mereka dapat berpartisipasi secara aktif dan setara dalam kehidupan publik dan privat..		

Samarinda, 11 Januari 2024

Kepala Dinas



DR. Ibu Araby, M.M.Pd

Pembina Utama Muda IV/ c

NIP 19670713 199103 1 013



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
(DP2PA)

Jln. Dahlia No. 01. Komplek Balaikota. Kelurahan Bugis. Kota Samarinda Tel/Fax (0541) 743307,
Telpon Pengaduan +62 833-2442-1313 Kode Pos : 75121 Email : dpppakotasamarinda@yahoo.com

LEMBAR KERJA GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) Tahun 2024			
Baris 1	Nama OPD	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
	Program	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	
	Kegiatan	<ul style="list-style-type: none">- Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam daerah kabupaten/kota- Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
	Sub Kegiatan	<ul style="list-style-type: none">- Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota- Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
	Tujuan	Memberdayakan keluarga agar dapat menjalankan fungsi-fungsinya secara optimal dalam membentuk individu yang berkualitas dan berdaya saing	
Baris 2	Data Pembuka Wawasan (Data Responsif Gender)	Data Putusan Dispensasi perkawinan usia anak tahun 2023 : <ul style="list-style-type: none">- Catin usia anak laki-laki sebanyak 25 orang- Catin usia anak perempuan sebanyak 77 orang Total : 102 Catin Usia Anak	
Baris 3	Faktor Kesenjangan	Faktor kesenjangan/	- Sumber Daya Manusia yang Terbatas

		permasalahan (452)	- Stigma Sosial dan budaya membuat beberapa keluarga merasa malu untuk mengakses layanan peningkatan kualitas keluarga.
		Sebab Kesenjangan Internal (di OPD)	- SDM teknis profesional (Psikolog) - Belum tersedia Gedung dan Sarana Prasarana Puspaga - Belum memadainya anggaran untuk honorarium Psikolog Puspaga - Anggaran yang Tidak Memadai
		Sebab Kesenjangan Eksternal	- Kesenjangan dalam Penegakan Kebijakan dan Regulasi (Kurang nya sosialisasi tentang Undang-Undang perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)
Baris 4	Tujuan Responsif Gender		menciptakan kondisi yang mendukung kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, serta menghapuskan ketidakadilan yang ada dalam struktur keluarga, yang dapat menghambat kesejahteraan keluarga secara keseluruhan.
Baris 5	Rencana Aksi		<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan advokasi kebijakan dan sosialisasi Tentang UU Perkawinan, UU Perlindungan Anak 2. Melakukan MOU dengan Stakeholder dalam mencegah dan menurunkan angka perkawinan usia anak 3. Melakukan advokasi percepatan penurunan perkawinan usia anak berbasis komunitas 4. Menyediakan Layanan Komprehensif bagi keluarga 5. Menginisiasi terbitnya Surat Edaran Walikota tentang Pencegahan dan Penghentian Perkawinan Anak di Kota Samarinda 6. Menyediakan Layanan Komprehensif bagi keluarga melalui PUSPAGA 7. Membuat Video Iklan Layanan Masyarakat tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak. 8. Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Usia Anak melalui Radio (Heartline FM dan RRI Pro 1 FM)

Baris 6	Data Dasar/Baseline	Data Putusan Dispensasi perkawinan usia anak tahun 2023 : - Catin usia anak laki-laki sebanyak 25 orang - Catin usia anak perempuan sebanyak 77 orang Total : 102 Catin Usia Anak	
Baris 7	Pengu kuran Hasil	Output	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendaatkan Advokasi dan Pendampingan - Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga - Jumlah Layanan Komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan perlindungan anak
		Outcome	meningkatkan kesejahteraan keluarga secara holistik
		Dampak	Peningkatan Kesejahteraan Keluarga, Kualitas Pengasuhan dan Perlindungan Anak dan Kesetaraan Gender dalam Keluarga

Samarinda, 11 Januari 2024

Kepala Dinas



DR. IGU Araby, M.M.Pd
Pembina Utama Muda IV/ c
NIP 19670713 199103 1 013



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
(DP2PA)

Jln. Dahlia No. 01. Komplek Balaikota. Kelurahan Bugis. Kota Samarinda Tel/Fax (0541) 743307,
Telpon Pengaduan +62 833-2442-1313 Kode Pos : 75121 Email : dpppakotasamarinda@yahoo.com

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER
(GENDER BUDGET STATEMENT)

SKPD : **Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

TAHUN ANGGARAN : **2024**

PROGRAM	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	
KEGIATAN	<ul style="list-style-type: none">- Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam daerah kabupaten/kota- Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
KODE Kegiatan	2.08.04.2.02	
ANALISIS SITUASI	Data Putusan Dispensasi perkawinan usia anak tahun 2023 : <ul style="list-style-type: none">- Catin usia anak laki-laki sebanyak 25 orang- Catin usia anak perempuan sebanyak 77 orang Total : 102 Catin Usia Anak	
RENCANA TINDAK	Kegiatan	<ul style="list-style-type: none">- Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam daerah kabupaten/kota- Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
	Tujuan	menciptakan kondisi yang mendukung kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, serta menghapuskan ketidakadilan yang ada dalam struktur keluarga, yang dapat menghambat kesejahteraan keluarga secara keseluruhan.

		<p>Aktivitas</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan advokasi kebijakan dan sosialisasi Tentang UU Perkawinan, UU Perlindungan Anak. 2. Melakukan MOU dengan Stakeholder dalam mencegah dan menurunkan angka perkawinan usia anak 3. Melakukan advokasi percepatan penurunan perkawinan usia anak berbasis komunitas 4. Menyediakan Layanan Komprehensif bagi keluarga 5. Menginisiasi terbitnya Surat Edaran Walikota tentang Pencegahan dan Penghentian Perkawinan Anak di Kota Samarinda 6. Menyediakan Layanan Komprehensif bagi keluarga melalui PUSPAGA 7. Membuat Video Iklan Layanan Masyarakat tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak. 8. Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Usia Anak melalui Radio (Heartline FM dan RRI Pro 1 FM)
		<p>Sumber daya (Inputs)</p>	<p>SDM PD, Tenaga Profesional (Konselor dan Psikolog)</p> <p>Anggaran : PAD</p> <p>Perangkat Keras (Komputer, Laptop, Printer, ATK, Hard Disk Eksternal, Flash Disk)</p>
		<p>output</p>	<p>- Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan Advokasi dan Pendampingan</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga - Jumlah Layanan Komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan perlindungan anak
ALOKASI SUMBER DAYA	Anggaran	Rp. 572.427.000	
	SDM	Pegawai PD, Psikolog, Konselor dan Admin Puspaga	
	Peralatan dan Mesin	Perangkat Keras (Komputer, Laptop, Printer, ATK, Hard Disk Eksternal, Flash Disk)	
Outcomes	meningkatkan kesejahteraan keluarga secara holistik		
Dampak	Peningkatan Kesejahteraan Keluarga, Kualitas Pengasuhan dan Perlindungan Anak dan Kesetaraan Gender dalam Keluarga		

Samarinda, 11 Januari 2024

Kepala Dinas



DR. Irena Araby, M.M.Pd

Pembina Utama Muda IV/ c

NIP 19670713 199103 1 013



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
(DP2PA)

Jln. Dahlia No. 01. Komplek Balaikota. Kelurahan Bugis. Kota Samarinda Tel/Fax (0541) 743307,
Telpon Pengaduan +62 833-2442-1313 Kode Pos : 75121 Email : dpppakotasamarinda@yahoo.com

LEMBAR KERJA GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) Tahun 2024		
Baris 1	Nama OPD	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Program	Perlindungan Perempuan
	Kegiatan	<ul style="list-style-type: none">- Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota.- Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat daerah kab/kota- Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota- Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	Sub Kegiatan	<ul style="list-style-type: none">- Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota- Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota- Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota- Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan (UPTD PPA)- Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota (UPTD PPA)

	Tujuan		<ul style="list-style-type: none"> - Mendorong Partisipasi Aktif Semua Pihak dalam Pencegahan Kekerasan - Memperkuat Jaringan Layanan dan Informasi tentang Kekerasan terhadap Perempuan - Mengurangi Angka Kekerasan terhadap Perempuan
Baris 2	Data Pembuka Wawasan (Data Responsif Gender)		Jumlah data kekerasan terhadap perempuan yang terlayani komperhenisf tahun 2023 total 45 korban (UPTD PPA).
Baris 3	Faktor Kesenjangan	Faktor kesenjangan/ permasalahan (452)	Faktor Kesenjangan Ekonomi, Sosial dan Budaya, Hukum, Kultural dan Religius, Kebijakan dan Implementasi
		Sebab Kesenjangan Internal (di OPD)	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya SDM pelaksana yang terlatih. - Perubahan Kebijakan terkait anggaran sub kegiatan kurang mendukung pelaksanaan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan - Sarana Prasarana UPTD PPA (Rumah Perlindungan) belum terpisah antara laki-laki dan perempuan
		Sebab Kesenjangan Eksternal	<ul style="list-style-type: none"> - Norma Sosial dan Budaya - Ketimpangan Ekonomi - Kebijakan dan Hukum yang Lemah (Belum ada Perda Perlindungan Perempuan) - Pengaruh Struktur Keluarga dan Masyarakat - Pengaruh Lingkungan
Baris 4	Tujuan Responsif Gender		Terlayaninya masyarakat korban kekerasan terhadap perempuan melalui keterlibatan stakeholder dan lapisan masyarakat.
Baris 5	Rencana Aksi		<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat Koordinasi Lintas Sektor 2. Persiapan Penyusunan RANDA Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan TPPO 3. Sosialisasi 16 Titik Rentan (Kelurahan) 4. Sosialisasi Pencegahan Kekerasan terhadap perempuan dan TPPO di THM (Tempat Hiburan Malam), Dasawisma, RT, Kampus. 5. Membuat Video Iklan Layanan Masyarakat 6. Kampanye Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan TPPO

			<p>7. Monitoring dan Evaluasi kepada seluruh Kader FORUM PERKASA (Forum Peduli Kekerasan Dalam Rumah Tangga)</p> <p>8. Pelatihan Manajemen Kasus bagi kader FORUM PERKASA dan UPTD PPA</p> <p>9. FGD Persiapan KRPPA</p> <p>10. Pemberian Bantuan Spesifik terhadap korban Bencana Khusus Perempuan</p> <p>11. Melaksanakan 6 Layanan UPTD PPA (Pengaduan Masyarakat, Penjangkauan Korban, Pengelolaan Kasus, Penampungan Sementara, Mediasi, Pendampingan terhadap Klien yang mengalami kekerasan)</p>
Baris 6	Data Dasar/Baseline		Jumlah data kekerasan terhadap perempuan yang terlayani komperhenisf tahun 2023 total 45 korban (UPTD PPA).
Baris 7	Pengu kuran Hasil	Output	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Kab/Kota. - Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan kewenangan kab/kota.
		Outcome	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan lingkup kab/kota
		Dampak	menciptakan perubahan positif baik untuk korban individu maupun untuk masyarakat secara keseluruhan

Samarinda, 11 Januari 2024

Kepala Dinas



Prindu Araby, M.M.Pd

Pembina Utama Muda IV/ c

NIP 19670713 199103 1 013



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
(DP2PA)

Jln. Dahlia No. 01. Komplek Balaikota. Kelurahan Bugis. Kota Samarinda Tel/Fax (0541) 743307,
Telpon Pengaduan +62 833-2442-1313 Kode Pos : 75121 Email : dpppakotasamarinda@yahoo.com

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER
(GENDER BUDGET STATEMENT)

SKPD : **Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

TAHUN ANGGARAN : **2024**

PROGRAM	Program Perlindungan Perempuan	
KEGIATAN	<ul style="list-style-type: none">- Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota.- Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat daerah kab/kota- Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota- Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
KODE Kegiatan	2.08.03.2.02	
ANALISIS SITUASI	Jumlah data kekerasan terhadap perempuan yang terlayani komperhenisf tahun 2023 total 45 korban (UPTD PPA).	
RENCANA TINDAK	Kegiatan	<ul style="list-style-type: none">- Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota.- Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat daerah kab/kota- Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota- Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	Tujuan	Terlayannya masyarakat korban kekerasan terhadap perempuan

			melalui keterlibatan stakeholder dan lapisan masyarakat.
		Aktivitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat Koordinasi Lintas Sektor 2. Persiapan Penyusunan RANDA Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan TPPO 3. Sosialisasi 16 Titik Rentan (Kelurahan) 4. Sosialisasi Pencegahan Kekerasan terhadap perempuan dan TPPO di THM (Tempat Hiburan Malam), Dasawisma, RT, Kampus. 5. Membuat Video Iklan Layanan Masyarakat 6. Kampanye Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan TPPO 7. Monitoring dan Evaluasi kepada seluruh Kader FORUM PERKASA (Forum Peduli Kekerasan Dalam Rumah Tangga) 8. Pelatihan Manajemen Kasus bagi kader FORUM PERKASA dan UPTD PPA 9. FGD Persiapan KRPPA 10. Pemberian Bantuan Spesifik terhadap korban Bencana Khusus Perempuan 11. Melaksanakan 6 Layanan UPTD PPA (Pengaduan Masyarakat, Penjangkauan Korban, Pengelolaan Kasus, Penampungan Sementara, Mediasi, Pendampingan terhadap Klien yang mengalami kekerasan)
		Sumber daya (Inputs)	SDM (Pegawai PD, Kader Forum Perkasa, Forum Puspa, TRC PPA, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Lembaga Masyarakat)

			Anggaran : APBD Kota Samarinda
			Perangkat Keras (Komputer, Laptop, Printer, Mobil Perlindungan).
		<i>output</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota. - Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan kewenangan kab/kota. - Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan Pengaduan -
ALOKASI SUMBER DAYA	<i>Anggaran</i>	Rp. 1.191.747.500	
	<i>SDM</i>	(Pegawai PD, Kader Forum Perkasa, Forum Puspa, TRC PPA, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Lembaga Masyarakat)	
	<i>Peralatan dan Mesin</i>	Perangkat Keras (Komputer, Laptop, Printer, Mobil Perlindungan).	
Outcomes	Jumlah kasus kekerasan terhadap Perempuan lingkup daerah kab/kota		
Dampak	Menurunnya angka kasus kekerasan terhadap Perempuan (KtP).		



Samarinda, 11 Januari 2024

Kepala Dinas

DR. Ibnu Araby, M.M.Pd

Pembina Utama Muda IV/ c

NIP 19670713 199103 1 013



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
(DP2PA)

Jln. Dahlia No. 01. Komplek Balaikota. Kelurahan Bugis. Kota Samarinda Tel/Fax (0541) 743307,
Telpon Pengaduan +62 833-2442-1313 Kode Pos : 75121 Email : dpppakotasamarinda@yahoo.com

LEMBAR KERJA GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) Tahun 2024		
Baris 1	Nama OPD	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Program	Program Perlindungan Khusus Anak
	Kegiatan	<ul style="list-style-type: none">- Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota- Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota- Penyediaan Layanan bagi AMPK yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kab/kota
	Sub Kegiatan	<ul style="list-style-type: none">- Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA- Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota- Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi AMPK tingkat Daerah kab/kota- Koordinasi layanan pelaksanaan layanan AMPK
	Tujuan	<ul style="list-style-type: none">- Memberikan pencegahan, penanganan, perlindungan, dan pelayanan yang komprehensif dan berkelanjutan bagi anak-anak yang mengalami kekerasan, eksploitasi, atau pelanggaran hak-hak anak.- Tersedianya 6 Layanan UPTD PPA (Pengaduan Masyarakat, Penjangkauan Korban, Pengelolaan Kasus, Penampungan Sementara, Mediasi, dan Pendampingan terhadap Klien yang mengalami kekerasan)
Baris 2	Data Pembuka Wawasan	<ul style="list-style-type: none">- Jumlah data kekerasan terhadap Anak yang terlayani komprehensif tahun 2023 : 160 Korban (UPTD PPA)

	(Data Responsif Gender)		- Jumlah data pilah gender dan anak pada OPD dan Lembaga Terkait Data SIGA
Baris 3	Faktor Kesenjangan	Faktor kesenjangan/ permasalahan (452)	- Kurangnya Pelatihan Sumber Daya Manusia - Stigma Sosial dan Ketidakpedulian Masyarakat - Korban tidak memiliki dokumen kependudukan
		Sebab Kesenjangan Internal (di OPD)	- SDM Kurang (quantity) - Anggaran tidak mendukung target
		Sebab Kesenjangan Eksternal	- Kurangnya pemahaman dan kesadaran Masyarakat tentang perlindungan dan pemenuhan hak anak - Kurangnya informasi terkait layanan pengaduan
Baris 4	Tujuan Responsif Gender	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan pencegahan, penanganan, perlindungan, dan pelayanan yang komprehensif dan berkelanjutan bagi anak-anak yang mengalami kekerasan, eksploitasi, atau pelanggaran hak-hak anak. - Tersedianya 6 Layanan UPTD PPA (Pengaduan Masyarakat, Penjangkauan Korban, Pengelolaan Kasus, Penampungan Sementara, Mediasi, dan Pendampingan terhadap Klien yang mengalami kekerasan) 	
Baris 5	Rencana Aksi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi Pencegahan kekerasan terhadap anak di Lembaga Pendidikan 2. Peningkatan kapasitas SDM Petugas Penyedia Layanan (Diknas, UPTD PPA, Rumah Sakit, TRC PPA, PATBM) 3. Bimtek LPKRA (Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak) bagi lembaga pendidikan di Kota Samarinda. 4. Pembentukan dan Pelatihan Manajemen dan Penanganan Kasus bagi PATBM 5. Pembentukan dan Pelatihan Fasilitator Perlindungan Anak di 10 Kecamatan se-Kota Samarinda 	

			6. Pelaksanaan 6 Layanan UPTD PPA (Pengaduan Masyarakat, Penjangkauan Korban, Pengelolaan Kasus, Penampungan Sementara, Mediasi, dan Pendampingan terhadap Klien yang mengalami kekerasan)
Baris 6	Data Dasar/Baseline		<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah data kekerasan terhadap Anak yang terlayani komprehensif tahun 2023 : 160 Korban (UPTD PPA) - Jumlah data pilah gender dan anak pada OPD dan Lembaga Terkait Data SIGA
Baris 7	Pengu- kuran Hasil	Output	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih - Jumlah Lembaga Layanan Anak yang mendapatkan pelatihan - Jumlah Kegiatan Pencegahan KTA Terpadu - Jumlah AMPK yang mendapatkan Layanan
		Outcome	Jumlah kasus kekerasan terhadap anak lingkup daerah kab/kota
		Dampak	Meningkatnya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak, Peningkatan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak, terciptanya lingkungan yang kondusif, meningkatnya layanan AMPK pada UPTD PPA Kota Samarinda.

Samarinda, 11 Januari 2024

Kepala Dinas



DR. Ihu Araby, M.M.Pd

Pembina Utama Muda IV/ c

NIP 19670713 199103 1 013



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
(DP2PA)

Jln. Dahlia No. 01. Komplek Balaikota. Kelurahan Bugis. Kota Samarinda Tel/Fax (0541) 743307,
Telpon Pengaduan +62 833-2442-1313 Kode Pos : 75121 Email : dpppakotasamarinda@yahoo.com

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER
(GENDER BUDGET STATEMENT)

SKPD : **Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

TAHUN ANGGARAN : **2024**

PROGRAM	Program Perlindungan Khusus Anak	
KEGIATAN	<ul style="list-style-type: none">- Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota- Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota- Penyediaan Layanan bagi AMPK yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kab/kota	
KODE Kegiatan	2.08.05.2.01	
ANALISIS SITUASI	<ul style="list-style-type: none">- Jumlah data kekerasan terhadap Anak yang terlayani komprehensif tahun 2023 : 160 Korban (UPTD PPA)- Jumlah data pilah gender dan anak pada OPD dan Lembaga Terkait Data SIGA	
RENCANA TINDAK	Kegiatan	<ul style="list-style-type: none">- Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota- Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota- Penyediaan Layanan bagi AMPK yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kab/kota
	Tujuan	<ul style="list-style-type: none">- Memberikan pencegahan, penanganan, perlindungan, dan pelayanan yang komprehensif dan berkelanjutan bagi anak-anak yang mengalami kekerasan,

		<p>eksploitasi, atau pelanggaran hak-hak anak.</p> <p>- Tersedianya 6 Layanan UPTD PPA (Pengaduan Masyarakat, Penjangkauan Korban, Pengelolaan Kasus, Penampungan Sementara, Mediasi, dan Pendampingan terhadap Klien yang mengalami kekerasan)</p>
	Aktivitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi Pencegahan kekerasan terhadap anak di Lembaga Pendidikan 2. Peningkatan kapasitas SDM Petugas Penyedia Layanan (Diknas, UPTD PPA, Rumah Sakit, TRC PPA, PATBM) 3. Bimtek LPKRA (Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak) bagi lembaga pendidikan di Kota Samarinda. 4. Pembentukan dan Pelatihan Manajemen dan Penanganan Kasus bagi PATBM 5. Pembentukan dan Pelatihan Fasilitator Perlindungan Anak di 10 Kecamatan se-Kota Samarinda 6. Pelaksanaan 6 Layanan UPTD PPA (Pengaduan Masyarakat, Penjangkauan Korban, Pengelolaan Kasus, Penampungan Sementara, Mediasi, dan Pendampingan terhadap Klien yang mengalami kekerasan)

		Sumber daya (Inputs)	SDM yang bersertifikasi (Mediator, Fasilitator, Psikolog, Banhum) Anggaran : PAD Perangkat Keras (Komputer, Laptop, Printer, ATK, Hard Disk Eksternal, Flash Disk)
		output	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih - Jumlah Lembaga Layanan Anak yang mendapatkan pelatihan - Jumlah Kegiatan Pencegahan KTA Terpadu - Jumlah AMPK yang mendapatkan Layanan
ALOKASI SUMBER DAYA	Anggaran	Rp. 544.000.000	
	SDM	Pegawai PD, UPTD PPA, Aktivistis, Satgas TPKS, Forum Anak, TRC PPA	
	Peralatan dan Mesin	Perangkat Keras (Komputer, Laptop, Printer, ATK, Hard Disk Eksternal, Flash Disk)	
Outcomes	Jumlah kasus kekerasan terhadap anak lingkup daerah kab/kota		
Dampak	Meningkatnya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak, Peningkatan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak, terciptanya lingkungan yang kondusif, meningkatnya layanan AMPK pada UPTD PPA Kota Samarinda.		

Samarinda, 11 Januari 2024

Kepala Dinas



DR. Tonu Araby, M.M.Pd

Pembina Utama Muda IV/ c

NIP 19670713 199103 1 013



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
(DP2PA)

Jln. Dahlia No. 01. Komplek Balaikota. Kelurahan Bugis. Kota Samarinda Tel/Fax (0541) 743307,
Telpon Pengaduan +62 833-2442-1313 Kode Pos : 75121 Email : dppkotasamarinda@yahoo.com

LEMBAR KERJA GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) Tahun 2024		
Baris 1	Nama OPD	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Program	Program Pengelolaan sistem data gender dan anak
	Kegiatan	Pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kabupaten/kota
	Sub Kegiatan	Penyediaan data gender dan anak di kewenangan kabupaten/kota
	Tujuan	Memberikan dasar untuk menyusun kebijakan, program, dan kegiatan yang inklusif dan responsif terhadap isu gender dan anak.
Baris 2	Data Pembuka Wawasan (Data Responsif Gender)	<ul style="list-style-type: none">- Jumlah data kekerasan terhadap Anak yang terlayani komperhenisf tahun 2023 : 160 Korban (UPTD PPA)- Jumlah data pilah gender dan anak pada OPD dan Lembaga Terkait Data SIGA
Baris 3	Faktor Kesenjangan	<ul style="list-style-type: none">- Kurangnya Pemahaman PD dalam mendukung pengumpulan data gender dan anak.- Keterbatasan Akses dan Infrastruktur Teknologi- Keterbatasan Data yang Akurat dan Komprehensif- Keterbatasan Koordinasi antar Lembaga
	Sebab Kesenjangan Internal (di OPD)	<ul style="list-style-type: none">- Jumlah SDM Pelaksana terbatas (quantity)- Anggaran tidak mendukung target
	Sebab Kesenjangan Eksternal	<ul style="list-style-type: none">- Kurangnya pemahaman PD tentang pentingnya data gender dan anak.- Data yang diminta Tidak Tersedia di PD.- Kurangnya Dukungan Kebijakan- Data yang Tidak Lengkap dan Tidak Akurat- Kurangnya Dukungan dari Stakeholder

Baris 4	Tujuan Responsif Gender	Memberikan dasar untuk menyusun kebijakan, program, dan kegiatan yang inklusif dan responsif terhadap isu gender dan anak.	
Baris 5	Rencana Aksi	<ol style="list-style-type: none"> 1. FGD Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Pengumpulan Data Gender dan Anan 2. Pelatihan Simfoni Kemen PPPA 3. Usul Kegiatan Statistik Sektoran Penyusunan Data Gender dan Anak melalui ROMANTIK (BPS) 4. Upgrade Aplikasi SIPPEKA 	
Baris 6	Data Dasar/Baseline	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah data kekerasan terhadap Anak yang terlayani komperhenisf tahun 2023 : 160 Korban (UPTD PPA) - Jumlah data pilah gender dan anak pada OPD dan Lembaga Terkait Data SIGA 	
Baris 7	Pengu- kuran Hasil	Output	Tersedia dan tersajinya Dokumen Data Gender dan anak kota Samarinda
		Outcome	<ul style="list-style-type: none"> - Membantu mempermudah dalam mendapatkan informasi data gender dan anak, - Meningkatnya partisipasi PD dalam pengumpulan data gender dan anak, - Menurunnya kasus kekerasan terhadap anak -
		Dampak	Tersedianya data gender dan anak kota Samarinda

Samarinda, 11 Januari 2024

Kepala Dinas



DR. Widi Araby, M.M.Pd
Pembina Utama Muda IV/ c
NIP 19670713 199103 1 013



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
(DP2PA)

Jln. Dahlia No. 01. Komplek Balaikota. Kelurahan Bugis. Kota Samarinda Tel/Fax (0541) 743307,
Telpon Pengaduan +62 833-2442-1313 Kode Pos : 75121 Email : dpppakotasamarinda@yahoo.com

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER
(GENDER BUDGET STATEMENT)

SKPD : **Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

TAHUN ANGGARAN : **2024**

PROGRAM	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak		
KEGIATAN	Pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kabupaten/kota		
KODE Kegiatan	2.08.05.2.01		
ANALISIS SITUASI	<ul style="list-style-type: none">- Jumlah data kekerasan terhadap Anak yang terlayani komperhenisf tahun 2023 : 160 Korban (UPTD PPA) - Jumlah data pilah gender dan anak pada OPD dan Lembaga Terkait Data SIGA		
RENCANA TINDAK	Kegiatan	Pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kabupaten/kota	
	Tujuan	Memberikan dasar untuk menyusun kebijakan, program, dan kegiatan yang inklusif dan responsif terhadap isu gender dan anak.	
	Aktivitas	<ol style="list-style-type: none">1. FGD Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Pengumpulan Data Gender dan Anan2. Pelatihan Simfoni Kemen PPPA3. Usul Kegiatan Statistik Sektoran Penyusunan Data Gender dan Anak melalui ROMANTIK (BPS)4. Upgrade Aplikasi SIPPEKA	

		Sumber daya (Inputs)	SDM Pengelola Data (1 dari kebutuhan 3)
			Anggaran : PAD
			Perangkat Keras (Komputer, Laptop, Printer, ATK, Hard Disk Eksternal, Flash Disk)
		output	Tersedianya Dokumen Data Pilah Gender dan Anak
ALOKASI SUMBER DAYA	Anggaran	Rp. 250.000.000	
	SDM	Pegawai PD, Tenaga Ahli (UNTAG), Operator Simfoni (RS. AWS, RS. I.A Moeis, UPPA Polresta, UPTD PPA, DP2PA)	
	Peralatan dan Mesin	ATK, Komputer, Laptop, Printer, Wi-Fi, Hard-Disk Eksternal.	
Outcomes	Peningkatan Akurasi dan Ketepatan Kebijakan		
Dampak	Terwujudnya Sistem Data yang Terintegrasi dan Mutakhir, Perencanaan Pembangunan yang Lebih Inklusif dan Responsif.		

Samarinda, 11 Januari 2024

Kepala Dinas



DR. Ibnu Araby, M.M.Pd

Pembina Utama Muda IV/ c

NIP 19670713 199103 1 013



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
(DP2PA)

Jln. Dahlia No. 01. Komplek Balaikota. Kelurahan Bugis. Kota Samarinda Tel/Fax (0541) 743307,
Telpon Pengaduan +62 833-2442-1313 Kode Pos : 75121 Email : dpppakotasamarinda@yahoo.com

LEMBAR KERJA GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) Tahun 2024		
Baris 1	Nama OPD	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Program	Pemenuhan Hak Anak (PHA)
	Kegiatan	Pelebagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota
	Sub Kegiatan	<ul style="list-style-type: none">• Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota• Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan PHA kewenangan kab/kota.
	Tujuan	Meningkatkan Kesadaran dan Edukasi kepada Pemerintah, Masyarakat, Dunia Usaha, Media Massa melalui Pemantauan dan Evaluasi Implementasi PHA
Baris 2	Data Pembuka Wawasan (Data Responsif Gender)	<ul style="list-style-type: none">• Data Anak Kota Samarinda usia 0 sd 18 Tahun (- 1 Hari) Tahun 2023• Sekolah Ramah Anak (SRA) Baru 1 Terstandardisasi (MTs Negeri) dari 174 Sekolah Ramah Anak sesuai SK Wali Kota• Puskesmas Ramah Anak (PRA) belum terstandardisasi dari 15 Puskesmas sesuai SK Wali Kota.• Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) Belum terstandardisasi.• Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) baru 1 yang terstandardisasi (Taman Cerdas)• Rumah Ibadah Ramah Anak (RIRA) belum terstandardisasi dari 3 Rumah Ibadah sesuai SK Wali Kota.• SDM terlatih Konvensi Hak Anak (KHA) pada PD, LM, DU, dan Media Massa.
Baris 3	Faktor Kesenjangan	<ul style="list-style-type: none">- Kurangnya Pengetahuan dan Pemahaman Tentang PHA- Kurangnya Koordinasi Antar Sektor- Keterbatasan Infrastruktur dan Teknologi- Kurangnya Monitoring dan Evaluasi yang Efektif
	Sebab Kesenjangan Internal (di OPD)	<ul style="list-style-type: none">• Jumlah SDM Pelaksana terbatas (quantity)• Anggaran Kegiatan terbatas

	Sebab Kesenjangan Eksternal	<ul style="list-style-type: none"> • Sumber Daya Eksternal (Finansial dan Manajerial) Pemerintah dan non Pemerintah. - Keterbatasan anggaran ini menghambat kampanye edukasi dan kesadaran publik yang dapat dilakukan oleh pemerintah atau lembaga mitra. - Tanpa alokasi dana yang cukup, berbagai upaya untuk melibatkan dunia usaha dan media dalam meningkatkan kesadaran tentang hak anak menjadi terbatas
Baris 4	Tujuan Responsif Gender	Meningkatkan Kesadaran dan Edukasi kepada Pemerintah, Masyarakat, Dunia Usaha, Media Massa melalui Pemantauan dan Evaluasi Implementasi PHA
Baris 5	Rencana Aksi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pra Verifikasi Lapangan Kota Layak Anak pada sarana prasarana pendukung. 2. Rakor Gugus Tugas KLA 3. Proses Evaluasi Mandiri KLA 4. Bimtek Konvensi Hak Anak (KHA) 5. Advokasi KLA 6. Bimtek SRA (Sekolah Ramah Anak) 7. Sosialisasi RIRA (Rumah Ibadah Ramah Anak) 8. Sosialisasi PRA (Puskesmas Ramah Anak) 9. Penguatan FA (Forum Anak) Kota, Kecamatan, Kelurahan. 10. Sosialisasi Kelana dan Dekela 11. Peringatan HAN (Hari Anak Nasional)
Baris 6	Data Dasar/Baseline (Copy Data Pembuka Wawasan)	<ul style="list-style-type: none"> • Data Anak Kota Samarinda usia 0 sd 18 Tahun (~ 1 Hari) Tahun 2023 • Sekolah Ramah Anak (SRA) Baru 1 Terstandardisasi (MTs Negeri) dari 174 Sekolah Ramah Anak sesuai SK Wali Kota • Puskesmas Ramah Anak (PRA) belum terstandardisasi dari 15 Puskesmas sesuai SK Wali Kota. • Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) Belum terstandardisasi. • Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) baru 1 yang terstandardisasi (Taman Cerdas) • Rumah Ibadah Ramah Anak (RIRA) belum terstandardisasi dari 3 Rumah Ibadah sesuai SK Wali Kota. • SDM terlatih Konvensi Hak Anak (KHA) pada PD, LM, DU, dan Media Massa.

Baris 7	Pengu kuran Hasil	Output	Nilai Evaluasi Mandiri KLA sebesar 800-900 poin (Utama)
		Outcome	Meningkatnya Sarpras yang terstandarisasi
		Dampak	<ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan yang Responsif terhadap Anak - Peningkatan Kerja Sama dengan Pemerintah dan Dunia Usaha - Meningkatnya Kesadaran Masyarakat tentang Hak Anak

Samarinda, 11 Januari 2024

Kepala Dinas



DR. Ibnu Araby, M.M.Pd
Pembina Utama Muda IV/ c
NIP 19670713 199103 1 013



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
(DP2PA)

Jln. Dahlia No. 01. Komplek Balaikota. Kelurahan Bugis. Kota Samarinda Tel/Fax (0541) 743307,
Telpon Pengaduan +62 833-2442-1313 Kode Pos : 75121 Email : dpppakotasamarinda@yahoo.com

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER
(GENDER BUDGET STATEMENT)

SKPD : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

TAHUN ANGGARAN : 2024

PROGRAM	Pemenuhan Hak Anak (PHA)		
KEGIATAN	Pelebagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota		
KODE Kegiatan	2.08.06.2.01		
ANALISIS SITUASI	<ul style="list-style-type: none">• Sekolah Ramah Anak (SRA) Baru 1 Terstandardisasi (MTs Negeri) dari 174 Sekolah Ramah Anak sesuai SK Wali Kota• Puskesmas Ramah Anak (PRA) belum terstandardisasi dari 15 Puskesmas sesuai SK Wali Kota.• Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) Belum terstandardisasi.• Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) baru 1 yang terstandardisasi (Taman Cerdas)• Rumah Ibadah Ramah Anak (RIRA) belum terstandardisasi dari 3 Rumah Ibadah sesuai SK Wali Kota.• SDM terlatih Konvensi Hak Anak (KHA) pada PD, LM, DU, dan Media Massa.		
RENCANA TINDAK	Kegiatan	Pelebagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota	
		Tujuan	Penyediaan Sarana Prasarana yang terstandardisasi sesuai indikator Kota Layak Anak.
		Aktivitas	1. Pra Verifikasi Lapangan Kota Layak Anak pada sarana prasarana pendukung. 2. Rakor Gugus Tugas KLA 3. Proses Evaluasi Mandiri KLA
			SDM
			Anggaran

Sumber daya (Inputs) Perangkat Keras (Komputer)	output Nilai Evaluasi Mandiri KLA sebesar 700-800 poin (Nindya)	Anggaran Rp. 620.000.000	SUMBER DAYA	Outcomes Meningkatnya Sarpras yang terstandardisasi	Dampak Terwujudnya Samarinda menuju Kota Layak Anak
		SDM Pegawai PD, APSAI,			
		Peralatan dan Mesin Komputer, Scanner, Printer			

Samarinda, 11 Januari 2024

Kepala Dinas



DR. Ibnu Araby, M.M.Pd
Pemda Utama Muda IV/c
NIP 19670713 199103 1 013